



Temanggung, 31 Januari 2024

Nomor : / SKKMR/PerumdaBP/I/2024

Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada :

Kantor DPP Perbarindo

Komp Patra II No. 46

Jl. Jend Ahmad Yani Baypass

Cempaka Putih 10510

JAKARTA PUSAT

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023

Memperhatikan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami kirimkan dengan hormat Laporan Penerapan Tata Kelola Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Demikian agar menjadikan periksa.

Direksi,


RETNO NENDRA WIARTY, S.E., M.M
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665423-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600555-30012024102509

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bankpasar_tmg_2007@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-30 10:25:09



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LAPORAN PELAKSANAAN
Penerapan Tata Kelola

Perumda BPR Bank Pasar Kab. Temanggung

2023



**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PERUMDA BPR BANK PASAR KABUPATEN
TEMANGGUNG
TAHUN 2023**



**Jl. Letjend Suprpto No. 32 Temanggung
TELEPON: 0293491814**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik sangat dibutuhkan BPR dalam meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan semakin beratnya persaingan usaha industri perbankan khususnya BPR, risiko yang dihadapi BPR juga semakin kompleks. Untuk itu dalam rangka mengoptimalkan penerapan Tata Kelola BPR sebagaimana diatur dalam POJK No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No. 24 / SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas SEOJK No. 5/ SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk berusaha meningkatkan penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik dan berusaha secara konsisten menjaga integritas seluruh jajaran organisasi untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik, yaitu Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Akuntability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness) dalam seluruh aktivitas usaha BPR

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar Tata Kelola yang baik diharapkan BPR dapat terus mempertahankan bisnisnya secara sehat dan kompetitif, sekaligus sebagai upaya dalam menjaga kepercayaan para stakeholders.

Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung secara bertahap telah memenuhi faktor-faktor penilaian penerapan tata kelola yang baik. Dalam hal masih terdapat penerapan yang belum maksimal, Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung selalu berupaya memperbaiki dan menyempurnakannya secara bertahap dan konsisten.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	RETNO NENDRA WIARTY
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR 2. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan/ jenjang organisasi 3. Menindaklanjuti temuan audit & rekomendasi dari SKAI BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, OJK, dan/atau otoritas lain 4. Membentuk satuan kerja / menunjuk pejabat dalam melaksanakan fungsi audit intern, MR & kepatuhan 5. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, dengan adanya pemisahan tanggung jawab antara unit kerja yang menangani pembukuan, operasional & kegiatan penunjang operasional 6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM melalui Dewan Pengawas 7. Menyiapkan Rencana Bisnis BPR & rencana kerja lainnya 8. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK & peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian 9. Memantau & menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan 10. Memantau & menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan/atau otoritas lainnya 11. Memastikan terlaksananya sosialisasi & pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait peraturan OJK terkini & peraturan perundang-undangan lainnya 12. Melaporkan kepada anggota direksi lainnya & dewan pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR 13. Melaporkan kepada dewan pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh direksi 14. Menyusun kebijakan & pedoman penerapan MR secara tertulis 15. Mengembangkan budaya MR pada seluruh jenjang organisasi 16. Memastikan peningkatan kompetensi SDM terkait MR 17. Memastikan para pejabat eksekutif & karyawan BPR memahami & mengimplementasikan MR melalui berbagai media yang tersedia 18. Memastikan bahwa fungsi MR telah beroperasi secara independen 19. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan MR & exposure risiko yang diambil BPR		
2.	Nama	:	ESTI WIBOWO
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Bersama dengan Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai tanggung jawab dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. 2. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bank, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat; 3. Menetapkan, memutuskan, dan menyetujui dalam rangka realisasi kredit yang diberikan		

kepada debitur. 4. Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada debitur yang menunggak secara efektif dan efisien. 5. Bertanggung jawab atas pengaduan, penanganan, dan penyelesaian keluhan/ pengaduan nasabah. 6. Bertanggung jawab atas penghimpunan dana kepada masyarakat. 7. Melakukan pemantauan serta melakukan langkah-langkah perbaikan mengenai : - Perkembangan dan jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan dan deposito berjangka, serta sumber-sumber dana lainnya. - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan. - Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan debitur tertentu. - Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah. - Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan. 8. Menindaklanjuti temuan-temuan penting dalam perkreditan dan lainnya yang dilaporkan oleh pengawas intern. 9. Pelaksanaan rencana perkreditan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan ke OJK. 10. Memantau perkembangan kondisi internal dan eksternal perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi usaha Bank.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris terkait pemenuhan struktur organisasi Bank dengan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang terpisah dari fungsi bagian umum SDM sebagaimana rekomendasi OJK, upaya mengembangkan sektor kredit swasta dan UMKM untukantisipasi penurunan kredit sektor pegawai, sosialisasi budaya kepatuhan, budaya risiko, penetapan core value Bank, pemantauan penanganan kredit bermasalah, pemantauan pengkinian data dan pelatihan penerapan APU PPT; merealisasikan rencana pembangunan perluasan gedung arsip aula dan area parkir serta memastikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	KRISTRI WIDODO
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Komisaris atau Ketua Dewan Pengawas memastikan terselenggarannya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan organisasi, 2. melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. 3. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR 4. memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi pejabat audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK maupun otoritas lainnya 5. melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris; dan 6. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal 7. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun; 8. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank		
2.	Nama	:	IWAN SISWANTO
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Bersama dengan Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas memastikan terselenggarannya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan organisasi, melakukan		

pengawasan, arahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal
Rekomendasi Kepada Direksi :
1 Persetujuan atas Rencana Bisnis BPR, 2 persetujuan dan pertimbangan rotasi, mutasi dan kebijakan terkait kepegawaian 3 memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian fraud dan pengawasan terhadap pelaksanaan APU PPT 4 memberikan evaluasi dan persetujuan pengkinian kebijakan Bank 5 memberikan saran dan masukan untuk menambah porsi penyaluran kredit ke kredit UMKM untuk mengantisipasi penurunan kredit pegawai akibat pemberlakuan kebijakan gaji bruto 6 memberikan nasehat atau pertimbangan terkait pelaksanaan penyaluran gaji ASN, PPPK dan kegiatan penyaluran dana alokasi desa
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR tidak memiliki Komite karena modal inti masih dibawah Rp 80 milyar	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR belum memiliki komite karena modal inti belum belum mencapai Rp.80 milyar	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
-----	--

1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR belum memiliki komite karena modal inti belum mencapai Rp 80 milyar			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	RETNO NENDRA WIARTY	Rp0	0%
2.	ESTI WIBOWO	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi tidak memiliki saham pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	RETNO NENDRA WIARTY	-	-	0%
2.	ESTI WIBOWO	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RETNO NENDRA WIARTY	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ESTI WIBOWO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RETNO NENDRA WIARTY	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ESTI WIBOWO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain pada BPR.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	KRISTRI WIDODO	Rp0	0%
2.	IWAN SISWANTO	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	KRISTRI WIDODO	-	-	0%
2.	IWAN SISWANTO	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	KRISTRI WIDODO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	IWAN SISWANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota dewan komisaris maupun dengan pemegang saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	KRISTRI WIDODO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	IWAN SISWANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
anggota Dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota dewan Komisaris , maupun dengan Pemegang Saham				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp559.108.284	2	Rp393.772.359
2.	Tunjangan	2	Rp1.315.058.028	2	Rp59.065.848
3.	Tantiem	2	Rp280.190.299	2	Rp84.057.090
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp1.271.013.266	0	Rp219.532.167
Total			Rp3.425.369.877		Rp756.427.464
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi lainnya merupakan penerimaan berupa insentif, bonus, pakaian dinas dan tunjangan hari raya					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	kendaraan (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan (2), BPJS Kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
fasilitas perumahan dan asuransi kesehatan diberikan dalam bentuk uang tunjangan yang diterimakan bersama dengan gaji			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	8.18 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.27 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.33 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4.17 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji dimaksud merupakan gaji pokok dan tunjangan yang diterima selama 1 tahun, tidak termasuk penerimaan lain	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	25 Januari 2022	83	Rapat evaluasi kinerja tahun 2022 dan penetapan core value PERUMDA BPR BANK PASAR TEMANGGUNG yaitu IMPRESIF (Integritas, Amanah, Profesional, Service Excelent, Adaptif).
2.	06 Januari 2023	8	Evaluasi dan pembahasan langkah-langkah yang akan dilakukan tahun 2023.
3.	24 Januari 2023	10	Pembahasan Pembangunan Gedung Aula.
4.	27 Januari 2023	13	Rapat pembahasan rencana kredit program KPR BP-BKK

5.	01 Februari 2023	10	Rapat pembahasan materi pemaparan OJK.
6.	06 Februari 2023	83	Sosialisasi RBB 2023
7.	03 Maret 2023	9	Rapat evaluasi dan pembahasan evaluasi RBB 2023
8.	16 Maret 2023	7	Pembahasan / sosialisasi OY! (online zoom)
9.	17 Maret 2023	21	Sosialisasi penerapan strategi Anti Fraud, Budaya Kepatuhan dan Diseminasi SOP Transaksi Tabungan.
10.	10 April 2023	10	Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I
11.	03 Mei 2023	21	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penagihan Kredit.
12.	14 Juni 2023	9	Rapat Evaluasi
13.	04 Agustus 2023	27	Rapat evaluasi pencapaian kinerja (Fokus Kredit dan NPL)
14.	26 September 2023	8	Rapat Evaluasi
15.	17 Oktober 2023	6	USSI e-money
16.	06 September 2023	10	Rapat Presentasi Cobranding Payment Gateway dan H2H
17.	08 November 2023	8	Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perumda BPR Bank Pasar Temanggung dengan USSI Fintek
18.	16 November 2023	8	Rapat Pembahasan RBB 2024
19.	21 November 2023	8	Rapat Pembahasan RBB 2024
20.	05 Desember 2023	8	Rapat Pembahasan RBB 2024
21.	06 April 2023	15	Rapat koordinasi pembangunan perluasan gedung aula, arsip dan area parkir
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Materi rapat tahun 2023 didominasi evaluasi kinerja BPR dan perencanaan strategi berkaitan dengan semakin ketatnya persaingan usaha di sektor perbankan.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	KRISTRI WIDODO	5	0	23.81%
2.	IWAN SISWANTO	4	0	20%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Ketua Dewan Komisaris menghadiri keseluruhan rapat Dewan Komisaris, sedangkan Anggota Dewan Pengawas menghadiri 80% rapat				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
tidak terjadi penyimpangan internal selama periode pelaporan.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
tidak terdapat permasalahan hukum baik dalam proses penyelesaian maupun putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dihadapi BPR selama periode laporan.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama periode pelaporan.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	22 Februari 2023	Sosial	Bantuan peningkatan kapasitas pelajar melalui kegiatan SMK SWADAYA EXPO KE 4 TAHUN 2023	SMK SWADAYA Temanggung	Rp10.000.000
2.	10 April 2023	Sosial	pembagian paket sembako Idul Fitri untuk masyarakat tidak mampu di lingkungan kantor.	Bantuan Untuk Masyarakat Tidak Mampu	Rp5.000.000
3.	03 Mei 2023	Sosial	bantuan pengadaan rompi untuk kegiatan Pelaksanaan Kick Off Percepatan Umum Stunting Pemerintah Kabupaten Temanggung.	SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG	Rp12.400.000
4.	08 Mei 2023	Sosial	Bantuan pembangunan sarana ibadah Masjid JAMI' ROUDLATUL JANNAH Desa Greges Tembarak Temanggung.	Masjid JAMI' ROUDLATUL JANNAH Desa Greges Tembarak	Rp50.000.000
5.	07 Juni 2023	Sosial	pemberian bea siswa pelajar berprestasi SMP NEGERI 1 TLOGOMULYO	SMP NEGERI 1 TLOGOMULYO	Rp3.500.000
6.	08 Juni 2023	Sosial	Bantuan bencana kebakaran pondok pesantren Darul Mutaqien Bolong Ngadirejo Selopampang	PONPES DARUL MUTAQIEN BOLONG SELOPAMPANG	Rp10.000.000
7.	09 Juni 2023	Sosial	Bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) An Bapak RATNO, desa Banjarsari Kandangan	Bpk RATNO (DESA BANJARSARI KANDANGAN)	Rp12.500.000
8.	17 Juli 2023	Sosial	Lounging Kampung Gandem desa Ngadimulyo kecamatan Kedu kabupaten Temanggung.	DINAS KESEHATAN TEMANGGUNG	Rp2.500.000
9.	20 Juli 2023	Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik sdr ISTAFI di desa Tlogopudang, kec	Sdr ISTAFI (Ds Tlogo Pucang, kec Kandangan)	Rp12.500.000

			Kandangan, kab Temanggung.		
10.	22 Agustus 2023	Sosial	bantuan kegiatan UMKM Desa Lungge TAHUN 2023	PEMERINTAH DESA LUNGGE	Rp4.000.000
11.	01 September 2023	Sosial	bantuan kegiatan Gelar UMIKM FESTIVAL SENI BUDAYA KABUPATEN TEMANGGUNG 2023.	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	Rp18.205.000
12.	25 September 2023	Sosial	bantuan tenda untuk sarana PUBLIC SAFETY CENTER 119 DINAS KESEHATAN TEMANGGUNG.	DINAS KESEHATAN TEMANGGUNG	Rp6.000.000
13.	11 Desember 2023	Sosial	bantuan pengadaan 2 (dua) unit kursi roda untuk Palang Merah Indonesia Cabang Temanggung	PALANG MERAH INDONESIA	Rp2.650.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian dana BPR untuk kegiatan sosial, beasiswa pelajar serta pemberdayaan ekonomi & pengembangan UMKM diberikan melalui dana CSR Bank, dan BPR tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik.					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PERUMDA BPR BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG
Alamat	: Jl. Letjend Suprpto No. 32 Temanggung
Nomor Telepon	: 0293491814
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp54.648.779.573
Total Aset	: Rp549.231.998.522

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PERUMDA BPR BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.1 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.88	0.376
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.89	0.284
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.17	0.217
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.20	0.220
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	0.050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.29	0.229
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.40	0.180
10	Rencana Bisnis BPR	2.17	0.163
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.05	0.154
Nilai Komposit			2.100
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.88)

Dengan kenaikan jumlah modal inti BPR menjadi lebih dari 50 milyar, ketentuan jumlah Direksi BPR menjadi 3 (tiga) orang, namun sampai dengan bulan laporan jumlah Direksi BPR masih 2 (dua) orang dengan salah satu Direktur yaitu Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Namun demikian BPR telah berkomitmen untuk melakukan proses pemenuhan ketentuan jumlah Direksi tahun 2024 dengan mengajukan persetujuan pemenuhan kepada pihak pemilik (Pemerintah Kabupaten). Direksi BPR tidak memiliki hubungan dengan sesama Direksi atau Dewan Komisaris, keduanya berdomisili di kota yang sama dengan domisili kantor pusat BPR, telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.89)

Sejalan dengan perubahan ketentuan mengenai jumlah Direksi akibat kenaikan modal inti BPR pada laporan periode sebelumnya, jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan juga menjadi 3 (tiga) orang.

BPR telah berkomitmen untuk melakukan pemenuhan pengurus, namun pemenuhan jumlah Dewan Pengawas juga belum dapat dilaksanakan, menunggu persetujuan dari pemilik (Bupati)

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, tidak memiliki hubungan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan Direksi, dan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengawasan BPR dengan cukup baik

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR belum berkewajiban memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko karena modal inti BPR pada semester kedua tahun 2023 ini belum mencapai Rp 80 milyar.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian Benturan Kepentingan dan selama periode laporan tidak terdapat transaksi di BPR yang mengandung benturan kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.17)

Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani kegiatan operasional dan telah memastikan BPR sudah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan serta penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya. BPR juga telah membentuk Satuan Kerja yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional, serta telah melakukan penyempurnaan dan pengkinian sebagian besar kebijakan dan prosedur.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.2)

BPR telah membentuk satuan kerja audit intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. BPR juga telah menerapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan pedoman audit intern pada seluruh aspek yang secara langsung mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Pengawas dan Laporan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK sesuai ketentuan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah melaksanakan penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara KAP dengan OJK. KAP yang ditunjuk oleh BPR telah terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS (KPM) berdasarkan usulan Dewan Pengawas/ komisaris. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan kepada BPR secara tepat waktu, dan telah disampaikan oleh BPR kepada OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.29)

BPR sudah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko dan telah memiliki kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, namun masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan serta dilengkapi dengan ketentuan tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada aktivitas baru. BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan menerapkan manajemen risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan OJK.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.4)

BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait BMPK dan telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit, namun belum ditingkatkan sesuai POJK terbaru mengenai BMPK. Tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK pada periode laporan.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.17)

BPR telah menyusun rencana bisnis sesuai visi dan misi BPR yang menggambarkan rencana strategis BPR dan rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK, dan telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.05)

BPR telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan publikasi, laporan tahunan dan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dengan tata cara, jenis, cakupan dan materi sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK. Laporan publikasi dan laporan tahunan telah ditandatangani oleh paling sedikit 1 orang anggota Direksi dengan nama jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan dipublikasikan sesuai ketentuan OJK

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis atas seluruh kriteria Penilaian Penerapan Tata Kelola tersebut diatas, BPR mendapat nilai komposit 2,1 dengan peringkat 2, artinya BPR telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik. senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Dalam hal terdapat kelemahan terkait pemenuhan struktur organisasi, hal ini disebabkan karena BPR baru mengalami peningkatan modal inti menjadi diatas Rp. 50 milyar dan BPR telah berkomitmen untuk memenuhi ketentuan tersebut, namun pemenuhan struktur organisasi BPR dalam hal ini Direksi dan Dewan Pengawas, harus atas persetujuan pemilik yaitu Bupati yang sampai saat ini belum terpenuhi.

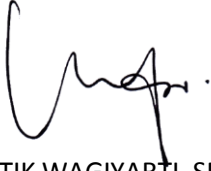
BPR telah memiliki dan melakukan peningkatan kebijakan dan prosedur, namun masih terdapat beberapa kebijakan dan prosedur BPR yang perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan otoritas terbaru dan sesuai ketentuan untuk BPR dengan modal inti diatas 50 milyar. Namun demikian, BPR telah memenuhi sebagian besar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan kondisi cukup memadai.

Struktur Tata Kelola BPR cukup memadai, proses pada sebagian besar faktor cukup efektif dan hasil penerapan tata kelola dari keseluruhan faktor sudah cukup baik.

Temanggung, 26 Januari 2024

PERUMDA BPR BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Disiapkan oleh



TUTIK WAGIYARTI, SE

Ketua Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko &
APU PPT

Disetujui oleh



RETNO NENDRA WIARTY, SE, MM

Direktur Utama YMFK